



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : KEMANTREN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINI RAHMAWATI
2. Jabatan : MANTRI PAMONG PRAJA
3. NHK : 679126

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/156 m2 di BANTUL, LAINNYA Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 149.800.000

1. MOTOR, HONDA SUPRAFIT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOTOR, HONDA RODA DUA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOTOR, YAMAHA VEGA R Tahun 2006, HADIAH Rp. 2.800.000
5. MOTOR, HONDA AFX12U21C07 M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 42.400.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.511.318

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.007.711.318

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.007.711.318

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.